

Lika Liku Rokok: Dari Barang Ilegal, Bekingan Oknum hingga Pencucian Uang

fanzine

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA



Pasar Gelap
Kursi Ibadah

Edisi Oktober 2025

TEMUKAN INFORMASI DAN BERITA ANALISIS MENDALAM HANYA DI
WEBSITE BERITA NASIONAL :

aktual

TERHANGAT TERPERCAYA

MENYAJIKAN INFORMASI, PERISTIWA, DAN ANALISA POLITIK,
HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SETIAP SAAT
MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI ANDA GUNA MEMBANTU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TEPAT DAN STRATEGIS

PARTNERSHIP : 0813-1019-7365

**Pengamat Kritis Gaji DPR
Masih Rp65 Juta Meskipun
Tuntutan Demonstrasi Besar
Disepakati**

Oleh Eka Permadi
WIB

**Was-was Antikimaks Kasus
Nadiem Makarim di Kejagung**

**Iskandar Tanojo Tunjangan
Kantong Gaji Rp65 Juta
Rinciannya**
7 September 2015, 15:54
Tiga Bulan

Pasar di Balik Doa

Dalam sejarahnya, ibadah selalu dimaknai sebagai ruang suci. Tempat manusia berhadapan dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Namun di tengah hiruk pikuk kekuasaan, bahkan ruang suci pun tak luput dari transaksi dan titipan kepentingan.

Laporan utama kami kali ini, “Pasar Gelap Kursi Ibadah,” menelusuri sisi gelap pengelolaan ruang keagamaan, dari birokrasi perizinan hingga praktik jual beli pengaruh atas nama “amanah.”

Di Laporan Khusus, kami mengulas “Lika Liku Rokok” dari barang ilegal, bekingan oknum, hingga pencucian

uang lintas wilayah. Cak Nanto, dalam wawancara, menegaskan bahwa reformasi Polri hanya mungkin jika sinergi moral dibangun dari dalam dan luar institusi.

Dari Nusantara, kepemimpinan baru Saparudin–Dessy di Pangkalpinang membawa harapan baru. Sementara di Nasional, kami menyoroti penindakan korupsi Rp300 triliun dan kebijakan umrah untuk semua visa. Dari Gaza hingga Oase, kami menutup dengan pesan sederhana: jaga nurani, rawat nilai.

Selamat membaca. Selamat menyalakan nurani.

Daftar Isi

Laporan Utama

- Pasar Gelap Kursi Ibadah 4
- Uang Jemaah di Tangan BPKH: Transparansi yang Hilang di Tanah Suci 8
- Sengkarut Kuota Haji Dilembaga Anti Rasuah 10
- Asa Harapan Baru Kementerian Haji, Stop Korupsi yang Berulang! 14

Laporan Khusus

- Lika Liku Rokok: Dari Barang Ilegal, Bekingan Oknum hingga Pencucian Uang 16
- Cukai Rokok Pisau Bermata Dua, Antara Nasib Buruh dan Kesehatan 22

Wawancara

- Cak Nanto: Reformasi Polri Butuh Sinergi dari Dalam dan Luar 26

Nusantara

- Saparudin–Dessy Resmi Dilantik, Tandai Awal Kepemimpinan Baru Pangkalpinang 28

Nasional

- Korupsi Rugikan Negara Rp300 Triliun, Prabowo Sita Enam Smelter Ilegal PT Timah 30
- Kemenhaj Unkip Arab Saudi Izinkan Umrah Bisa Pakai Semua Jenis Visa 30

Dunia Aktual

- Perang Usai, Gaza Bersiap Bangkit Kembali 31

Oase

- Menghormati Ulama: Pilar Keberkahan Ilmu dan Penjaga Kehidupan Beragama 33

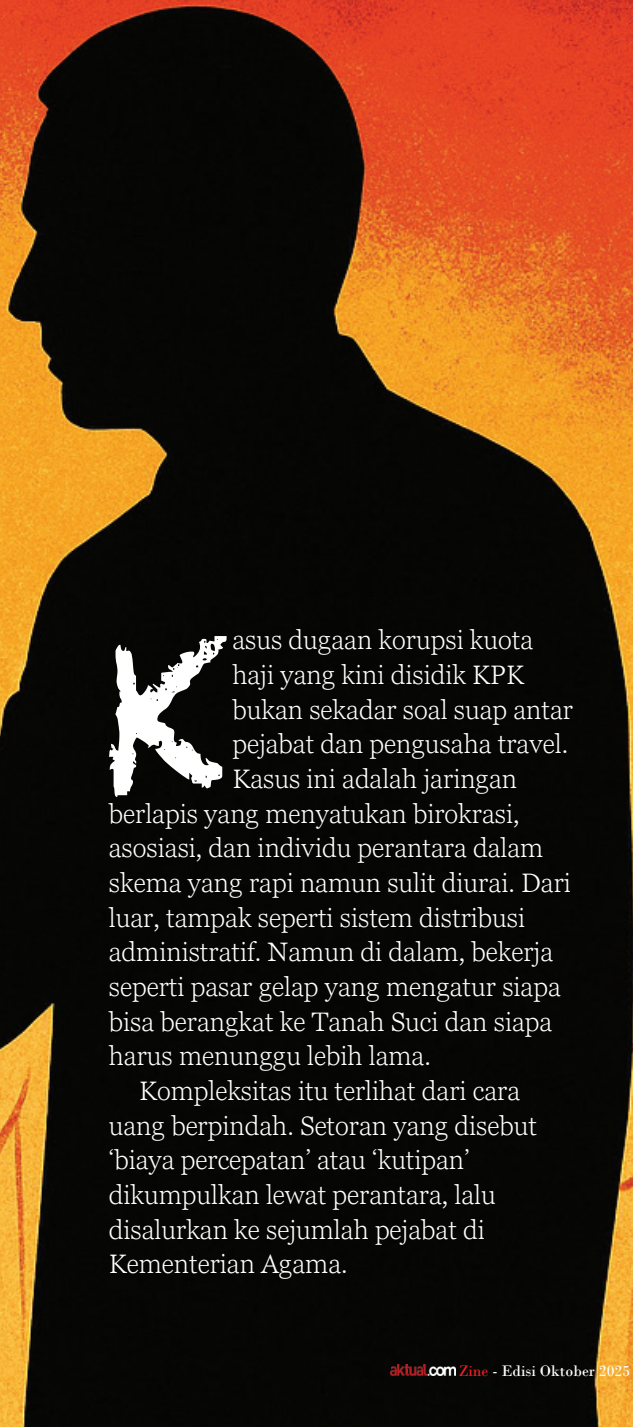
aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Direktur Utama: Andy Abdul Hamid **Pemimpin Umum:** Tino Oktaviano **Pimpinan Redaksi:** Rizal Maulana Malik **Redaktur Liputan Khusus:** Eka Permadhi, Erobay Jawi Fahmi **Redaktur Fanzine:** Andry Haryanto, Achmat **Redaktur Medsos:** Al Jalli **Redaktur Videografis:** Saiful, Dany Candra Setiadi **Redaktur:** Indra Bonaparte **Reporter:** Rizky Zulkarnain, Sandi Setyawan, Erobi Jawi Fahmi, Achmat, Muhammad Khamdi (Pantura Pekalongan), Edy Gustan (Lombok), Ricky Setiawan **Kontributor:** Nugroho Sentoso, Halimansyah, Danang Wibowo, Hary Fauzan (Bekasi), Muhammad Aderman (Riau), Ferry Sapto (Batam) **Head Marketing:** Almalludin Sudrajat Muchlica **IT:** Rohadi M Raja **Legal Officer:** DAAR AFKAR & CO. LAWYERS

Alamat Redaksi: Caprof Building Jl. Prof DR Soepomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon** (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com



Pasar
Gelap
Kursi
Ibadah



Kasus dugaan korupsi kuota haji yang kini disidik KPK bukan sekadar soal suap antar pejabat dan pengusaha travel. Kasus ini adalah jaringan berlapis yang menyatukan birokrasi, asosiasi, dan individu perantara dalam skema yang rapi namun sulit diurai. Dari luar, tampak seperti sistem distribusi administratif. Namun di dalam, bekerja seperti pasar gelap yang mengatur siapa bisa berangkat ke Tanah Suci dan siapa harus menunggu lebih lama.

Kompleksitas itu terlihat dari cara uang berpindah. Setoran yang disebut 'biaya percepatan' atau 'kutipan' dikumpulkan lewat perantara, lalu disalurkan ke sejumlah pejabat di Kementerian Agama.



“Ada yang modulusnya percepatan, ada yang memang modulusnya memberikan, semacam ya ‘kutipan’ ke pihak-pihak Kementerian Agama,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Nilai uang yang sudah diamankan lembaga antirasuah ini mendekati Rp 100 miliar, sebagian diserahkan kembali oleh biro perjalanan setelah dipanggil penyidik atau melalui asosiasi. “Kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah, mendekati seratus ada, gitu,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Namun angka itu hanyalah permukaan dari peta masalah yang jauh lebih besar. Potensi kerugian negara akibat manipulasi pembagian kuota haji yang seharusnya 92 persen reguler dan 8 persen khusus, tapi diduga diubah menjadi 50:50. Kalkulasi sementara bisa mencapai angkat Rp 1 triliun.

Berlapis dan Berjenjang

KPK mendapati bahwa aliran dana dalam kasus ini tidak berjalan linear. Ia berlapis dan berjenjang, dengan pola pengumpulan uang menyerupai piramida, dari travel ke asosiasi, lalu ke ‘juru simpan’, sebelum akhirnya sampai ke tangan pejabat di Kementerian Agama.

“Jadi, ada juru simpan di beberapa tingkatan,” beber Budi Prasetyo.

“Mereka berfungsi sebagai pengumpul utama, lalu menyalurkan



foto: Aktual/DOK KPK

kepada pihak yang punya kewenangan menentukan kuota,” Budi menambahkan

Skema ini tidak mencuat tiba-tiba. Dalam penyelidikannya, KPK menemukan pola yang sudah berulang selama beberapa musim haji terakhir, tapi baru kali ini ditangani secara terbuka.

Kuota tambahan dari Arab Saudi menjadi pintu masuknya. Secara hukum, tambahan 20.000 kursi itu seharusnya diatur melalui keputusan menteri, agar pembagiannya jelas.

Namun praktik di lapangan menunjukkan pembagian ditetapkan lewat surat edaran internal, tanpa

dasar hukum yang kuat. Di ruang-ruang itulah uang berputar.

Dugaan jual-beli tidak berhenti pada jemaah. KPK menemukan sebagian kuota petugas haji, termasuk tenaga kesehatan dan pembimbing ibadah, juga diperjualbelikan kepada calon jemaah umum.

“Artinya, petugas kesehatan yang seharusnya mendampingi jemaah menjadi berkurang jumlahnya,” ungkap Budi.

Praktik itu tidak hanya memperkaya oknum, tapi juga mengorbankan fungsi layanan publik di tanah suci. Di sisi lain, juru simpan menjadi simpul paling menarik sekaligus paling misterius dalam penyidikan.

Sosok ini bukan pejabat negara, tapi memiliki akses langsung ke jaringan biro perjalanan dan pejabat Kemenag. Ia disebut berperan sebagai penampung dana setoran dari berbagai daerah, sebelum sebagian uang itu disalurkan kepada pihak-pihak tertentu.

“Juru simpan itu sedang kami dalami. Kami bekerja sama dengan PPAK untuk menelusuri rekening dan aset yang berkaitan,” kata Budi.

Cuci Uang, Cuci Tangan

Skema juru simpan ini bersifat bertingkat. Ada pengepul di tingkat asosiasi, lalu pengepul utama di lingkaran pusat. KPK menelusuri apakah dana itu hanya berhenti pada

satu individu atau sudah disamarkan dalam bentuk aset. Jika terbukti, lembaga antirasuah membuka kemungkinan menerapkan pasal TPPU.

“Kami akan lihat sejauh mana uang itu dialirkan, apakah disamarkan atau digunakan untuk membeli aset tertentu,” ujar Setyo Budiyanto.

Yang menarik, sebagian uang yang kini disita KPK ternyata dikembalikan secara sukarela. Ada beberapa pihak yang menyerahkan uang ketika kasus ini mulai mengemuka. Pengembalian itu diduga dilakukan oleh biro perjalanan yang ingin memutus jejak hukum, atau oleh asosiasi yang merasa ikut terseret.

Namun langkah itu tak serta-merta menghapus potensi pidana. Bagi KPK, pengembalian justru menguatkan bukti bahwa memang ada uang yang tidak semestinya berpindah tangan.

Hingga awal Oktober 2025, KPK menyebut penetapan tersangka tinggal soal waktu. Nama-nama belum diumumkan, tapi sinyalnya jelas. Penyidik telah memanggil sejumlah pejabat aktif dan mantan pejabat Kemenag, serta memeriksa perwakilan asosiasi travel seperti Gaphura dan AMPHURI.

Fokus penyidikan bukan lagi sekadar siapa yang menerima uang, tetapi bagaimana sistem di Kemenag memungkinkan hal itu terjadi tanpa meninggalkan catatan resmi.

Andry Haryanto



foto: bpkh.go.id

Uang Jemaah di Tangan BPKH: Transparansi yang Hilang di Tanah Suci

Setiap rupiah yang disetorkan calon jemaah haji adalah amanah. Namun, amanah itu seolah menguap di tangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga yang seharusnya menjaga dan mengembangkan dana jemaah justru disorot karena minim transparansi. Dalam konteks kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, kritik terhadap pengelolaan dana haji kembali mencuat.

Ketua Umum Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), Ferry Irawan, menyebut sistem haji selama ini terlalu koruptif dan manipulatif.

“Kami berharap kasus korupsi kuota haji ini membuka mata semua pihak bahwa pengelolaan dan pelaksanaan haji selama ini sangat koruptif dan manipulatif,” ujar Ferry.

Ia menegaskan, korupsi tidak hanya terjadi dalam pembagian porsi keberangkatan, tetapi juga dalam pengelolaan dana umat.

Ferry mengungkapkan bahwa publik belum pernah mendapatkan penjelasan transparan dari BPKH terkait aliran uang jemaah.

“Kita belum mendapatkan laporan transparansi dari BPKH soal bagaimana setiap rupiah dari uang jemaah haji dikelola, dan hasil investasinya bisa diterima jemaah haji secara layak,” paparnya.

Menurut Ferry, setiap calon jemaah haji reguler wajib menyetorkan uang muka Rp30 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Uang inilah yang dikelola BPKH untuk diinvestasikan dan hasilnya seharusnya dikembalikan bagi jemaah. Namun kenyataannya jauh berbeda.

“Ketika calon jemaah haji itu gagal berangkat karena uzur dan meninggal, serta tak bisa digantikan keluarganya, uang pengembalian yang diterima justru berkurang 75 persen dari dana yang sudah disetorkan. Ke mana uang hasil investasinya?” ucapnya.

“Kita belum mendapatkan laporan transparansi dari BPKH soal bagaimana setiap rupiah dari uang jemaah haji dikelola, dan hasil investasinya bisa diterima jemaah haji secara layak”

Pernyataan itu menggambarkan ketidakberesan sistem keuangan haji yang seolah dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik. Ferry menilai potensi kerugian jemaah sangat besar.

“Semestinya, setiap rupiah uang calon jemaah haji yang diinvestasikan harus kembali ke jemaah haji. Normalnya, ketika calon jemaah haji ini

gagal berangkat, maka uang yang dikembalikan melebihi setoran yang sudah disimpan,” katanya.

Ironinya, di tengah janji profesionalisme, audit BPKH oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun jarang diumumkan ke publik. Transparansi yang seharusnya menjadi roh lembaga itu justru hilang di balik tembok birokrasi.

Bagi Ferry, reformasi pengelolaan haji bukan sekadar mengganti kementerian dari Kemenag ke Kemenhaj, tetapi memastikan dana umat dikelola secara jujur.

“Masalah haji ini persoalan serius, menyangkut ibadah utama bagi umat muslim. Jangan main-main dengan penyelenggaraannya,” Ferry memungkas.

Andry Haryanto



foto: aktual.com



foto: aktual.com

Sengkarut Kuota Haji Dilembaga Anti Rasuah

KPK diminta mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini, KPK baru memeriksa dugaan keterlibatan

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, dan sejumlah pemilik travel haji dan umrah.

Diduga masih ada peran oknum pejabat Kementerian Agama yang

terkait kebijakan memberikan kouta haji tambahan sebanyak 10 ribu untuk haji khusus. Siapapun pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut mestinya turut diperiksa.

Demikian disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide, dan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

“Berdasarkan data kami selain tiga orang yang sudah dicekal juga ada pejabat lain yang diduga menerima gratifikasi melalui pemberangkatan haji anggota keluarganya dengan harga murah, termasuk Wamenag Syaiful Dasuki dan pejabat lainnya. Kami punya datanya dan sudah diserahkan ke KPK,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin, banyak keluarga pejabat kementerian yang menggunakan fasilitas haji plus dengan harga murah dari kouta haji tambahan tersebut. Hal itu, dinilainya sebagai salah satu bentuk gratifikasi.

“Misalnya, yang seharusnya bayar

400 juta, hanya bayar 200 juta. Kan 200 juta sisanya itu gratifikasi karena keluarga pejabat Kemenag. Data sudah diserahkan, biarkan KPK mendalami,” ujarnya.

Boyamin menyatakan, kasus haji tersebut sangat melukai ribuan jemaah calon haji dan masyarakat Indonesia yang masih menunggu puluhan tahun untuk berangkat haji. Namun saat ada penambahan kuota 20 ribu malah diberikan ke jemaah haji plus.



foto: aktual.com

“Misalnya, yang seharusnya bayar 400 juta, hanya bayar 200 juta. Kan 200 juta sisanya itu gratifikasi karena keluarga pejabat Kemenag. Data sudah diserahkan, biarkan KPK mendalami,”

Adapun Yusuf Sahide

menyampaikan, kasus kouta haji tambahan juga membuka informasi adanya jemaah reguler yang baru mendaftar bisa langsung berangkat haji tanpa antrian. Hal ini, katanya, menyakiti calon jemaah reguler lainnya yang menunggu waktu hingga puluhan tahun agar bisa naik haji.

“Dewas BPKH harus dilibatkan dalam

pengusutannya. KPK harus periksa meminta keterangan Dewas BPKH dan memeriksa Badan Pelaksana BPKH terkait keputusan itu,” ucap Yusuf.

Menurut Yusuf hal itu penting diusut karena dari keputusan tersebut merugikan calon jemaah haji reguler



Laporan Utama

yang sudah menunggu puluhan tahun. “Jemaah haji reguler yang langsung berangkat kan berarti menggunakan uang optimalisasi haji yang dikelola BPKH yang seharusnya menjadi hak jemaah haji yang sudah menunggu puluhan tahun,” paparnya.

Sedangkan Uchok Khadafi mengungkapkan, KPK harus mengungkap siapa saja oknum pejabat Kemenag yang menerima setoran uang dari biro haji dan umrah terkait tambahan kouta 10 ribu. Selama ini, katanya, KPK hanya menyebut oknum pejabat Kemenag menerima setoran tanpa mengungkap siapa saja oknum tersebut.

“KPK harus buka ke publik siapa saja oknum pejabat Kemenag penerima uang setoran dari biro travel. Agar publik bisa ikut mengawal dan mengawasi pengusutan kasus ini,” papar Uchok.

Menurut Uchok, tidak mungkin kasus ini hanya melibatkan menteri dan staf khusus. Oknum pejabat Kemenag, katanya, disinyalir sebagai pengepul uang dari biro travel dan membagi uang setoran itu ke beberapa pihak di Kemenag.



foto: aktual.com

“KPK harus buka ke publik siapa saja oknum pejabat Kemenag penerima uang setoran dari biro travel. Agar publik bisa ikut mengawal dan mengawasi pengusutan kasus ini,”

“Pasti ada operator yang menerima uang setoran dari biro travel, mengumpulkannya, lalu

membagi-bagikannya ke pihak-pihak terkait di Kemenag,” ungkap Uchok.

KPK saat ini tengah menangani kasus kouta haji tambahan musim haji 2024. KPK telah mengeluarkan surat cegah tangkal (cekal) ke Yaqut Cholil Qaumas, Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) dalam kasus tersebut.

KPK juga sudah melakukan pengeledahan ke kantor kemenag terutama ruang direktorat haji dan umrah, kantor Maktour Travel dan beberapa lokasi lainnya.

Praktik ini bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Kuota tambahan itu kemudian dilobi oleh sejumlah pengusaha travel kepada oknum pejabat Kemenag hingga terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.

KMA Nomor 130 itu membagi tambahan itu untuk haji reguler

sebanyak 50 persen, dan haji khusus 50 persen. Masalahnya, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatur bahwa sebanyak 92 persen kuota untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang, yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Pencegahan Yaqut tak lama setelah KPK mengumumkan telah memulai proses penyidikan dalam perkara ini pada Sabtu (9/8). Dalam perkara ini KPK menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, dugaan awal adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1 triliun. Meskipun begitu, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut.

Ratusan Travel Haji Terlibat

Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, hampir 400 travel haji diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka menerima diduga menyuap pihak di Kemenag untuk mendapatkan kuota tambahan 10 ribu.

“Siapa pun yang diduga mendapatkan keuntungan dari proses jual-beli kuota haji ya harusnya bisa jadi tersangka,” kata Boyamin.

Menurut Boyamin, alasan biro travel maupun pihak yang tergabung dalam asosiasi haji atau konsorsium perlu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima keuntungan dari penjualan kuota haji yang merugikan negara sebesar Rp1 triliun. Mereka juga diduga melakukan lobi kepada oknum pejabat Kemenag terkait pembagian kuota tersebut.

“Mulai paling bawah Biro Travel, terus yang konsorsium, itu dari sisi swastanya,” ucap Boyamin.

Boyamin menyebutkan, biro travel memberikan keuntungan dari jual beli kuota haji kepada oknum pejabat Kemenag sebagai bentuk komitmen fee dari hasil penjualan pembagian kuota tersebut.

Dugaan praktik jual beli kuota itu melibatkan setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag sebesar USD 2.600–7.000 per kuota, atau setara Rp41,9 juta–Rp113 juta (kurs Rp16.144,45). Transaksi tersebut dilakukan melalui asosiasi travel sebelum diserahkan kepada pejabat Kemenag secara berjenjang.

Boyamin mendesak KPK segera mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka dari pihak oknum pejabat Kemenag maupun biro travel.

Erobi Jawi Fahmi, Eka Permadhi



Asa Harapan Baru Kementerian Haji, Stop Korupsi yang Berulang!

Pembentukan Kementerian Haji diharapkan bisa membuka lembaran baru penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

Penyelewengan dan tidak transparans dalam pengelolaan haji harus dihentikan dan tidak menjadi kasusnyaabg berulang setiap tahun. Akankah hal ini bisa terjadi?

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina berharap Kementerian Haji dan Umrah menciptakan ekosistem penyelenggaraan haji yang semakin transparan dan akuntabel. Hal ini mengingat kerap terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan pelaksanaan ibadah haji saat masih berada dalam tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).

Kasus terbaru yakni penambahan kuota haji tambahan pada musim haji 2024 yang diduga melibatkan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kasus sebelumnya, terjadi



foto: Aktual/DOK DPR RI

pada periode 2011-2014 di mana KPK menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM).

“Kami berharap Kemenhaj bisa menciptakan ekosistem haji yang lebih transparan dan akuntabel. Sehingga menjadi dasar baik bagi DPR maupun semua pihak agar pelaksanaan haji bukan hanya milik pemerintah, tapi juga DPR, masyarakat, termasuk jemaah bisa

mengawasi,” kata politisi PDIP ini kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Terkait kasus kuota haji tambahan, Selly berharap KPK menyalisir semua pihak yang terlibat. Walaupun tidak ada kerugian negara, katanya, kalau bentuknya penyalahgunaan yang merugikan dana jemaah maka masih termasuk perilaku korupsi.

“Karena merugikan jemaah, apakah itu uang negara atau bukan, itu merugikan jemaah yang harus ditindaklanjuti KPK. Kan bisa dilihat kerugian jemaah berapa. Apalagi ada oknum dari travel haji, oknum pejabat kemenag, dan lainnya. Jadi KPK harus menyalisir semuanya,” ucap Selly.

Menurut Selly, DPR akan terus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji agar bisa semakin transparan dan akuntabel. Database jemaah, katanya, harus betul-betul bisa diinformasikan secara transparan dan diakses semua pihak, baik jemaah maupun pihak berwenang, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

“Kami pun mendesak KPK mempertimbangkan rekomendasi Pansus Haji DPR RI pada 2024 terkait pelaksanaan ibadah haji,” paparnya.

Misteri Tersangka Kuota Haji dan Ujian Keberanian KPK

Pansus Haji merekomendasikan,

agar Pemerintah membuat sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam menetapkan kuota haji, terutama dalam haji khusus terutama pengalokasian kuota haji tambahan. Setiap keputusan diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada public

Pansus Haji merekomendasikan agar negara memperkuat fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan haji khusus ke depan. Pansus juga mendorong peranan lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih detail mengawasi penyelenggaraan haji.

Pansus Haji juga merekomendasikan agar pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum, dilibatkan jika membutuhkan tindak lanjut.

Adapun, Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyampaikan Kemenhaj harus memastikan sistem database haji terpadu benar-benar siap, akurat, dan transparan untuk mencegah manipulasi data dan memastikan perpindahan antrian berjalan mulus tanpa merugikan jemaah haji.

Erobi Jawi Fahmi, Eka Permadhi

X aktualofficial

f Aktualcom

@Aktualcom

🎵 Aktualcom

Lika Liku Rokok: Dari Barang Ilegal, Bekingan Oknum hingga Pencucian Uang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menertibkan produksi dan peredaran rokok ilegal atau tak bercukai, baik dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri.

“Kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk-produk ilegal lagi. Itu enggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan,” tegas Purbaya.

Namun, Purbaya mengatakan, akan berupaya menjadikan produsen rokok ilegal menjadi legal. Selain penindakan hukum, Purbaya sedang mengkaji agar para produsen rokok ilegal ini masuk dalam sistem industri hasil tembakau (IHT).

“Kalau hanya dengan pemberantasan, kita ‘bunuh’ semua, ya matilah mereka. Tujuan saya untuk menciptakan lapangan pekerjaan jadi tidak tercapai,” ucapnya.

Persoalan rokok ilegal menjadi



foto: aktual.com

perhatian serius tidak hanya bagi pemerintah namun juga produsen-produsen rokok besar. Pemerintah mengaku adanya rokok ilegal menggerus penerimaan negara karena rokok tidak bercukai otomatis tidak memberikan pendapatan ke kas negara.

Sementara, bagi produsen rokok besar, masyarakat yang memilih membeli rokok ilegal karena lebih murah mengurangi penjualan mereka di pasaran yang akhirnya mengancam

kelangsungan pabrik, buruh, dan petani tembakau.

Menurut Indodata Research Center, ada peningkatan persentase rokok ilegal dari sekitar 28-30 persen pada tahun-tahun sebelumnya menjadi sekitar 46 persen pada 2024.

Indota pun merilis, potensi kerugian negara mencapai Rp 97,81 triliun dari peredaran rokok ilegal pada 2024.

Adapun Ditjen Bea Cukai mengungkapkan, pada Mei 2023 saja nilai barang rokok ilegal/ hasil tembakau ilegal yang ditindak mencapai sekitar Rp 6,7 triliun.

Oknum dan Produsen Rokok Besar

Besarnya nilai yang berputar di industri rokok ilegal ini menjadi salah satu faktor kenapa peredarannya masih marak di masyarakat. Hal ini pun menimbulkan pertanyaannya, mungkinkah ada yang melindungi bisnis haram tersebut? Apakah ada keterlibatan produsen rokok besar? Dan apakah ada potensi tindak pencucian uang dari hasil peredarannya?

Pengamat ekonomi dari Next Indonesia Herry Gunawan menyampaikan dugaan adanya dukungan atau perlindungan dari oknum aparat, dalam hal ini Bea Cukai, Kepolisian, maupun TNI, dalam produksi dan peredaran rokok ilegal.

“Ini kan produk rokok ilegal bukan 10-20 batang, ini produk ribuan dan jutaan batang yang beredar. Sangat mungkin bisnis ini dilindungi oknum aparat, seperti bea cukai, kepolisian, maupun lainnya. Kan tidak mungkin bisnis haram ini tidak terdeteksi oleh mereka,” paparnya.

Herry pun mencontohkan, bila ia misalnya berperan sebagai pengepul rokok ilegal, maka memerlukan gudang yang bisa menyimpan ribuan bahkan sampai jutaan batang rokok. Sebagai pengepul saja, ia memerlukan gudang dengan fasilitas yang besar, apalagi pabrik yang memproduksi rokok ilegal.

“Masa seh aparat tidak bisa mencium dan mendeteksi. Sangat mungkin mereka tahu tapi membiarkan dan melindunginya,” paparnya.

Herry pun menyebut peredaran rokok ilegal bukan saja berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Ia menyebut Pulau Sumatera dan Kalimantan banyak beredar rokok ilegal selundupan dari Malaysia maupun Singapura.



foto: nextindonesia.id

“...ini produk ribuan dan jutaan batang yang beredar. Sangat mungkin bisnis ini dilindungi oknum aparat, seperti bea cukai, kepolisian, maupun lainnya. Kan tidak mungkin bisnis haram ini tidak terdeteksi oleh mereka,”

Kepala Pusat Studi Center of Human and Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (CHED ITBAD) Roosita Meilani Dewi menyampaikan, meskipun pihaknya belum memiliki data pasti soal dugaan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi bisnis rokok ilegal, namun hal itu sangat mungkin terjadi.

“Bisa saja ada yang mendukung dan mendanai secara modal dan keamanan. Secara keamanan kan terkait produksi dan distribusi, itu kan kenapa sampai mudah memproduksi

dan beredar. Pasti ada yang berperan dalam hal modal dan keamanan, ini jadi PR bagi Pemerintah,” paparnya.

Dugaan keterlibatan oknum Bea Cukai, misalnya muncul di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat. Mengutip dari media daring lokal, Kalimantannews.id, masyarakat di perbatasan Malaysia mengeluhkan oknum Bea Cukai yang menyita rokok ilegal dari Malaysia namun kembali memutarkannya di pasar gelap.

“Rokok banyak ditangkap Bea Cukai. Tapi, selepas itu dijual lagi.

Mereka sekarang macam perampok di jalan,” ungkap seorang sumber yang menolak namanya disebut.

Menurut sumber tersebut, barang sitaan itu lenyap sangat cepat tanpa hitungan hari. Dalam hitungan jam, barang bukti yang seharusnya terkunci di gudang negara bisa hilang besok harinya.

Bahkan, media sosial X pernah diramaikan video seorang oknum anggota Polrestabes Surabaya yang diduga merebut mobil boks bermuatan rokok ilegal dari tangan Bea Cukai.

Berdasarkan unggahan video akun X @Hera*, Kamis (8/5/2025), peristiwa tersebut terjadi saat mobil boks sedang diamankan oleh petugas Bea Cukai. Pengunggah menyebutkan, cekcok antara polisi dan petugas Bea Cukai terjadi di Madura, Jawa Timur, Rabu (7/5/2025). Polisi kemudian diduga membawa kabur mobil boks ke arah Surabaya, Jawa Timur setelah adu mulut dengan petugas Bea Cukai.

Sorotan tajam penanganan rokok ilegal juga pernah disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Hincan Panjaitan dalam rapat kerja dengan Kapolri. Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan peran Polri dalam mengusut tuntas produksi dan pemberantasan peredaran rokok haram tersebut.

Polri disebutkan hanya baru menangkap pelaku-pelaku kecil dari rokok ilegal, sementara pemain

besar industri ini belum tersentuh. Buktinya, produksi dan peredaran rokok ilegal masih marak walaupun banyak di antara pengepul dan pengedarnya yang sudah ditindak hukum.

Apakah ada dugaan produsen rokok besar pun bermain rokok ilegal? Baik Herry maupun Roosita sama-sama memungkinkan prasangka itu. Menurut Herry, sangat mungkin pemain rokok ilegal berkolaborasi dengan produsen rokok besar yang legal.

“Kan bisa saja ada yang berelasi dengan produsen rokok besar yang tujuannya untuk mengambil pasar gelap di rokok, cerita seperti itu ada. Supaya produsen besar ini tidak kehilangan pendapatan juga kan, dapat ceruk keuntungan di rokok ilegal,” paparnya.

Roosita menyatakan, indikasi keterlibatan perusahaan rokok besar di rokok tak bercukai sangat terlihat dari produk yang mirip, dan diproduksi secara massif.

“Kita pertanyakan juga kenapa ada rokok ilegal? Siapa yang produksi? Itu kan hampir mirip produknya dengan produsen-produsen rokok besar. Produksi kan massif dan perlu modal besar. Modal besar dari mana? Karena itu indikasi ini perlu diselidiki bea cukai dan pajak. Perlu ada penindakan dari Kemenkeu,” paparnya.



TPPU di Rokok Ilegal Triliunan

Selain itu, Herry pun menyoroti adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam bisnis rokok ilegal. Menurutnya, ada dua kemungkinan TPPU di industri tersebut. Pertama, modal produksi dan distribusi rokok ilegal bisa saja dari uang haram.

“Uang gelap ditaruh sebagai modal membuat dan menjual rokok ilegal, karena kan pasti membutuhkan modal besar. Kedua, bisa juga uang hasil dari rokok ilegal kemudian diputar, dicuci ke usaha atau bisnis yang bersih. Dicuci misal ke properti, saham dan lainnya,” papar Herry.

Dugaan Herry ini beralasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pernah membongkar praktik pencucian uang hasil kejahatan penyelundupan rokok ilegal dari Vietnam ke wilayah Kepulauan Riau. Jutaan batang rokok ilegal itu direncanakan akan juga akan di distribusikan ke wilayah pesisir wilayah timur pulau Sumatera.

Direktur Analisis PPATK Maryanto, menyampaikan hasil penelusuran pihaknya ditemukan lima rekening yang menampung hasil uang hasil penyelundupan rokok ilegal oleh pelaku LHD. Lima rekening itu atas nama pelaku lainnya.

“Pelaku menggunakan rekening pihak ketiga (5 rekening) untuk melakukan transaksi hasil penyelundupan, setiap transaksi menggunakan catatan dalam



foto: Humas Bakamla RI

transaksinya. Pelaku berusaha memutus pengawasan PPATK karena banyak transaksi dilakukan dengan tunai. Pelaku juga melakukan penukaran valuta asing serta menginvestasikan ke aset seperti mobil, High speed craft (HSC) dan beberapa aset lainnya yang totalnya mencapai Rp 1 triliun,” ujarnya, Jumat (23/9/2022).

Kepala Sub Direktorat Penyidikan DJBC, Winarko menerangkan pengungkapan tindak pidana pencucian uang berkat kerjasama dengan PPATK sehingga mendapatkan bukti yang kuat untuk pengungkapan pencucian uang pelaku LHD.

“Kami mendapatkan bukti pelaku melakukan penyelundupan rokok ilegal dari Vietnam sebanyak 61 kali selama tahun 2019 hingga 2020. Saat tiba di perairan Kepri rokok di Kapal Layar Motor (KLM) dipindahkan ke



HSC lalu kemudian didistribusikan ke wilayah Kepri dan pesisir pulau Sumatera,” terangnya.

Penyidik juga bersama PPATK menemukan aliran dana untuk pembuatan satu unit kapal giant HSC 38 meter mesin MAN 3×1.800 HP, di salah satu galangan kapal di Batam dengan Rp 22,5 miliar. Uang tersebut didistribusikan ke 9 vendor untuk membangun kapal tersebut.

“Total aset dan uang yang disita penyidik Bea Cukai sebesar Rp 44,6 miliar,” tambahnya.

Untuk menjalankan aksi penyelundupan rokok ilegal, LHD membuat dua badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yakni PT PPJ dan PT PPB sehingga terlihat sebagai usaha legal.

“Sudah kami koordinasikan dengan pajak tidak ada pajak yang dibayarkan. Di perusahaan itu ada kegiatan ekspor

impor saat di cek data Bea Cukai tidak ada kegiatan tersebut. Jadi Hanya memiliki akta notaris perusahaan saja,” ujarnya.

Pada 2023, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali, Jawa Tengah, mengeksekusi kasus TPPU dari pasangan suami istri pengedar rokok ilegal dengan jumlah hampir Rp4,5 miliar. Kajari Boyolali menjelaskan bentuk pencucian uang yang dilakukan pasutri asal Klego diketahui dari pertanggungjawaban uang yang diperoleh dari tindak pidana kepabeanaan (peredaran rokok ilegal). Uang hasil penjualan rokok ilegal dicuci oleh pasutri asal Klego itu dengan modus membeli tanah, rumah, dan sebagian disimpan di bank.

Pembelian tanah dan rumah diatasnamakan orang lain, begitu juga sebagian uang disimpan di bank menggunakan nama orang. Uang Rp4,49 miliar, rumah, dan tanah tersebut dikumpulkan dari hasil penjualan rokok ilegal pada 2017-2020.

“Pada intinya, dalam rokok ilegal ada dana gelap, ada bisnis ilegal, maka transaksi ekonomi yang dihasilkan, penjualan dan pendapatannya haram secara hukum. Karena itu penting tidak hanya menyelidiki dan menysasar produsen atau pengedar yang kecil-kecil, lihat juga berelasi tidak dengan produsen dan pemodal pengusaha besar,” pungkas Herry.

Erobi Jawi Fahmi, Eka Permadhi

Cukai Rokok Pisau Bermata Dua, Antara Nasib Buruh dan Kesehatan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan Pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2026 mendatang. Keputusan ini diambil setelah Menkeu berdiskusi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Jumat (26/9/2025).

Meski awalnya berniat untuk menurunkan tarif cukai rokok pada 2026, Menkeu akhirnya tetap mempertahankan seperti pada 2025. Keputusan ini sesuai dengan permintaan produsen-produsen rokok besar, para buruh rokok, petani tembakau, dan komunitas kretek.

“Masukannya nggak menguntungkan satu atau merugikan yang lain. Tapi satu hal yang saya adopsikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukainya tahun 2006? Lalu mereka bilang asal nggak diubah itu sudah cukup. Ya sudah saya tidak akan ubah,” kata



Foto: aktual.com





Menkeu, se usai bertemu dengan perwakilan Wis milak, Djarum, Gudang Garam, Sampoerna dan lainnya.

Ketua Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN), Samukrah menyampaikan industri hasil tembakau (IHT) tahun ini terpuruk akibat kebijakan cukai yang salah dalam beberapa tahun terakhir.

“Ancaman PHK pun muncul. Kami harap dengan cukai tidak naik, tekanan pabrik rokok bisa berkurang

dan mereka bisa kembali menyerap tembakau petani,” katanya.

Tahan Kenaikan Cukai Rokok Untuk Hindari Ancaman PHK

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto, mengatakan Pemerintah memang semestinya mendengar aspirasi kaum pekerja yang menggantungkan hidupnya

pada ekosistem tembakau dengan tidak menaikkan tarif cukai rokok.

Juru bicara Komunitas Kretek Indonesia Rizky Fajar pun mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Menkeu. Menurutnya, ketika tarif cukai rokok naik, harga rokok akan ikut terkerek. Hal itu, katanya, tidak mengurangi konsumsi masyarakat terhadap rokok.

“Ga bakal ngaruh, masyarakat ketika rokok mahal, ya, belinya yang ilegal. Tidak ada hubungannya cukai naik kemudian perokok turun. Justeru ketika cukai rokok naik, petani rugi karena tembakau kualitas tingginya tidak terbeli dan buruh pabrik rokok terancam PHK. Termasuk pabrik legal terancam gulung tikar karena kalah saing,” paparnya.

Selain itu, ucap Rizky Benang, naiknya cukai rokok juga bisa mengurangi pendapatan negara karena masyarakat membeli rokok ilegal yang tidak memiliki cukai.

Dorong Kenaikan Cukai Atasa Nama Kesehatan dan



foto: x.com/TulusAbadi

“... rerata cukai rokok di level nasional baru mencapai 38-42 persen. Alias belum mencapai 57 persen seperti mandat UU Cukai. Jika dibandingkan dengan standar cukai internasional sebesar 75 persen (standar FCTC), cukai rokok di Indonesia masih rendah,”

57 persen.

“Sedangkan implementasinya, rerata cukai rokok di level nasional baru mencapai 38-42 persen. Alias belum mencapai 57 persen seperti mandat UU Cukai. Jika dibandingkan dengan standar cukai internasional sebesar 75 persen (standar FCTC), cukai rokok di Indonesia masih rendah,” papar Tulus.

Jadi, katanya, tarif cukai rokok yang tinggi itu bukan kebijakan

Penambahan Pemasukan Negara Dari Perokok

Namun, kebijakan ini mengundang kritik dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, dan sejumlah LSM lainnya yang menginginkan tarif cukai rokok dinaikkan untuk meminimalisir konsumsi rokok di tanah air.

Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi, menyatakan, keputusan Menkeu tidak menaikkan tarif cukai rokok merupakan hal yang paradoks, dan anti regulasi. Menurutnya, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memandatkan tarif cukai rokok sebesar

'firaun', tetapi justru melaksanakan mandat regulasi yakni UU Cukai. Klimaksnya untuk melindungi dan menyelamatkan perilaku 'firaun' dari industri rokok.

"Khususnya oligarki industri rokok. Toh setinggi apapun cukai rokok, juga tidak akan membunuh industri rokok, selagi industri rokok masih menjadi entitas legal," ucapnya.

Koordinator Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) Roosita Meilani Dewi menyampaikan, kenaikan cukai rokok bila dilihat dari logika ekonomi dan manajemen operasional perusahaan maka tidak ada yang secara langsung merugikan industri, tenaga kerja, dan petani.

"Dari 1 batang rokok itu kan ada biaya bahan baku, biaya SDM, dan sebagainya. Ketika produsen itu laba, maka ada laba cukai juga di situ. Artinya, tinggal bagaimana industri rokok menaikkan saja harga rokok, tidak perlu menyalahkan naiknya cukai," katanya.

Apalagi, ungkapnya, selama ini



foto: aktual.com

"Dari 1 batang rokok itu kan ada biaya bahan baku, biaya SDM, dan sebagainya. Ketika produsen itu laba, maka ada laba cukai juga di situ. Artinya, tinggal bagaimana industri rokok menaikkan saja harga rokok, tidak perlu menyalahkan naiknya cukai,"

upah buruh di industri rokok, misal di jenis sigaret kretek tangan (SKT) dibayar per batang yang belum layak secara UMR.

CEO & Founder Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menegaskan tidak naiknya tarif cukai akan mengurangi potensi penerimaan negara, sekaligus berdampak serius bagi produktivitas dan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, rokok ilegal yang marak saat ini disebabkan kenaikan tarif cukai yang kurang signifikan. Padahal, peningkatan cukai yang lebih substansial dapat

membawa dampak positif di berbagai aspek.

Studi CISDI (2024) menunjukkan kenaikan tarif cukai sebesar 45 persen berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp 7,92 triliun dan menciptakan lebih dari 148 ribu lapangan kerja. Karena itu, Diah membantah, bila kenaikan cukai rokok akan menurunkan pendapatan negara karena maraknya rokok tak bercukai.

Erobi Jawi Fahmi, Eka Permadhi

Cak Nanto: **Reformasi Polri** **Butuh Sinergi dari** **Dalam dan Luar**

Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan pembentukan Komite Reformasi Polri yang digadang menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat institusi kepolisian. Komite ini rencananya beranggotakan sembilan tokoh lintas bidang, di antaranya disebut nama Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra. Tujuannya, memberi masukan langsung kepada Presiden untuk mempercepat pembenahan di tubuh Polri yang selama ini menjadi sorotan publik.

Menanggapi rencana tersebut, Sunanto atau Cak Nanto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018–2022, menilai langkah itu sebagai keputusan politik yang cerdas dan strategis.

Menurut Ketua Dewan Pembina Cakrawala Negerawan ini, reformasi sejati hanya akan berhasil jika dilakukan secara sinergis antara pembenahan internal Polri dan pandangan eksternal negara, dengan fokus pada perubahan budaya, perilaku, dan sistem kerja yang lebih transparan.

Simak wawancara *Aktual.com* bersama Cak Nanto berikut ini.

Bagaimana Anda melihat rencana Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri?

Langkah yang sangat tepat. Presiden ingin memastikan perubahan di Polri tidak hanya dilakukan secara internal, tapi juga dikawal oleh tokoh-tokoh nasional agar mendapat kepercayaan publik. Ini sinyal kuat bahwa reformasi Polri menjadi agenda negara, bukan sekadar urusan institusi.

Nama seperti Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra disebut akan bergabung. Tanggapan Anda?

Itu kombinasi bagus antara pengalaman hukum dan pandangan kenegaraan. Tapi siapa pun yang dipilih, yang paling penting adalah semangat kolaborasi dan orientasi pada perbaikan, bukan politik.

Belum diumumkannya komite ini dianggap manuver politik. Setuju?

Saya melihatnya sebagai langkah bijak. Kalau diumumkan terlalu cepat tanpa dukungan internal, bisa menimbulkan resistensi. Presiden tampaknya ingin



memastikan reformasi ini berjalan tenang tapi pasti.

Komite disebut beranggotakan sembilan orang. Sudah ideal?

Cukup ideal. Komite ini bukan lembaga baru, hanya tim penasihat Presiden yang memberi masukan strategis agar reformasi berjalan efektif.

Reformasi seperti apa yang dibutuhkan Polri saat ini?

Yang paling penting adalah reformasi perilaku dan budaya kerja. Struktur dan aturan sudah baik, tapi perubahan mental dan etika perlu diperkuat. Polisi harus tetap tegas, tapi berperikemanusiaan.

Contohnya?

Soal suap di jalan misalnya. Itu bukan hanya soal aparat, tapi juga mental masyarakat. Kalau masyarakat tidak menawarkan suap, maka praktik itu berhenti. Reformasi harus dua arah.

Ada anggapan komite reformasi Presiden bisa tumpang tindih dengan tim reformasi Polri sendiri. Pendapat Anda?

Tidak. Justru keduanya harus sinergis. Tim internal memperbaiki dari dalam, sedangkan komite Presiden memberi perspektif dari luar. Tujuannya sama: memperkuat profesionalisme Polri.

Bagaimana Anda menilai kinerja Kapolri Listyo Sigit?

Pak Sigit bekerja substansial. Ia memperbaiki sistem rekrutmen, membuka komunikasi publik, dan menjalankan perintah Presiden secara konsisten. Ia tidak banyak bicara, tapi hasilnya nyata.

Ada yang menilai beliau terlalu loyal kepada Jokowi. Tanggapan Anda?

Kapolri memang harus patuh pada Presiden yang menjabat. Itu bukan soal loyalitas pribadi, tapi kontinuitas kebijakan. Reformasi harus berlanjut, bukan dimulai dari nol setiap ganti pemimpin.

Menurut Anda, reformasi Polri ini harus evolusioner atau revolusioner?

Evolusioner. Perubahan instan justru rawan guncangan. Kita perlu reformasi yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan agar Polri semakin profesional dan dipercaya publik.

Anda optimistis reformasi Polri bisa berhasil?

Saya optimistis. Selama ada kemauan dari pimpinan dan dukungan publik, reformasi ini akan jadi warisan besar bagi Presiden dan Kapolri dalam membangun Polri yang humanis dan modern.

Andry Haryanto



Foto: pangkalpinangkota.go.id

Saparudin–Dessy Resmi Dilantik, Tandai Awal Kepemimpinan Baru Pangkalpinang

Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang terpilih, Saparudin dan Dessy Ayutrisna, resmi dilantik oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di Gedung Tudung Saji, Rabu (15/10/2025).

Pelantikan ini menandai awal

masa jabatan periode 2025–2030, sekaligus menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya pelantikan kepala daerah Pangkalpinang digelar di kantor Wali Kota, bukan di kantor Gubernur Babel seperti lazimnya.

Sejak pagi, suasana di Gedung

Tudung Saji tampak khidmat. Sejumlah tamu undangan mulai berdatangan, di antaranya unsur Forkopimda, anggota DPRD, para kepala OPD, serta tokoh masyarakat.

Saparudin, atau yang akrab disapa Prof. Udin, bersama wakilnya Dessy Ayutrisna, tampil kompak mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) I berwarna putih lengkap dengan atribut jabatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya menjaga amanah jabatan dan menunaikan sumpah dengan penuh tanggung jawab.

“Pak Profesor, hari ini Anda dilantik dan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jangan main-main dengan sumpah. Banyak orang kuat dan tidak hidup sempurna karena melanggar sumpah,” tegas Hidayat dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Pangkalpinang akan semakin maju di bawah kepemimpinan Saparudin dan Dessy Ayutrisna.

“Saya yakin Pangkalpinang akan menjadi kota yang berarti, kota senyum. Saya juga berterima kasih kepada Penjabat Wali Kota Pangkalpinang yang selama sembilan bulan dua hari memimpin dengan baik, tanpa protes, tanpa sengketa.

Semua berjalan sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti tiga isu utama yang harus menjadi perhatian Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru, yakni kesehatan, penataan pasar, dan pengelolaan sampah.

“Ada tiga hal yang harus diperhatikan, Prof. Kesehatan, pasar yang masih amburadul, dan masalah sampah. Tolong dijaga dan dibenahi,” pesan Hidayat.

Selain itu, Hidayat menjelaskan alasan pelantikan digelar di Gedung Tudung Saji.

“Saya letakkan pelantikan di kantor wali kota karena ini lebih dekat dengan rakyat. Kasihan masyarakat kalau ke kantor gubernur, tidak bisa masuk dan ujung-ujungnya ngomel. Di sini masyarakat bisa hadir, lebih dekat. Tempat kecil tidak masalah, yang penting hati kita bersatu,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat terus terjalin demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kepada Profesor Udin dan Ibu Wakil Wali Kota, silakan bekerja. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik demi kemajuan Pangkalpinang dan kesejahteraan masyarakatnya,” tutup Hidayat.

Rizky Zulkarnain

Korupsi Rugikan Negara Rp300 Triliun, Prabowo Sita Enam Smelter Ilegal PT Timah

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyitaan enam unit smelter hasil penindakan kasus korupsi dan penambangan timah ilegal di kawasan PT Timah Tbk, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp300 triliun.

“Enam smelter sudah disita, dan di lokasi-lokasi ini kita temukan tumpukan tanah jarak dan ingot timah bernilai besar. Ini bukti keseriusan pemerintah menyelamatkan potensi pemasukan negara,” ujar Prabowo.

Dalam kunjungan kerjanya,



foto: presidenri.go.id

Prabowo turut menyaksikan penyerahan aset sitaan Kejaksaan Agung kepada PT Timah Tbk untuk dikelola kembali. Aset tersebut termasuk milik PT Tinindo

Internusa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah.

Kejaksaan Agung mencatat total aset rampasan mencapai Rp1,45 triliun, terdiri dari enam smelter, ratusan alat berat dan peralatan tambang, logam timah seberat 680 ton, serta puluhan bidang tanah. Bila dioperasikan penuh, aset ini diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga Rp4,6 triliun per tahun.

Pemerintah berharap langkah ini menjadi awal pemulihan ekonomi dan lingkungan dari praktik tambang ilegal.

Rizky Zulkarnain

Kemenhaj Ungkap Arab Saudi Izinkan Umrah Bisa Pakai Semua Jenis Visa

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan, seluruh pemegang jenis visa dapat menunaikan ibadah umrah selama berada di Kerajaan. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan prosedur dan memperluas akses layanan umrah, sejalan dengan Visi Saudi 2030.

Visa yang dimaksud mencakup kunjungan pribadi, keluarga, wisata, transit, hingga visa kerja. Langkah ini menunjukkan komitmen Arab Saudi memfasilitasi kedatangan umat Muslim agar beribadah dengan

mudah dan tenang.

Kementerian juga meluncurkan platform digital Nusuk Umrah, yang memungkinkan pengguna memilih paket, mengurus izin, serta memesan layanan umrah secara elektronik.

Pemerintah Kerajaan menegaskan kemudahan ini merupakan wujud perhatian Penjaga Dua Masjid Suci dan Putra Mahkota untuk mendukung umat Islam berziarah dalam suasana aman dan spiritual, dengan layanan berkualitas yang memperkaya pengalaman ibadah.

Rizky Zulkarnain



foto: aktual.com

Perang Usai, Gaza Bersiap Bangkit Kembali

Perang panjang yang menelan ribuan korban akhirnya berakhir. Hamas secara resmi mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza, setelah melalui serangkaian negosiasi dengan Israel yang dimediasi Mesir dan Qatar.

“Kami telah menyetujui kerangka untuk mengakhiri agresi terhadap

Gaza dan memulai rekonstruksi,” kata juru bicara Hamas dalam pernyataannya di Gaza, sebagaimana dikutip *Aktual.com* dari siaran resmi kelompok itu.

Hamas menegaskan, kesepakatan mencakup penarikan pasukan Israel, pembukaan kembali lintasan kemanusiaan, dan pertukaran tahanan.

Dari Washington, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut.

“Israel dan Hamas akhirnya menyetujui rencana gencatan senjata yang akan menjadi langkah besar menuju perdamaian permanen,” ujar Trump dalam konferensi pers di Florida



Foto: BPMI Satpres/Muchlis Jr

Trump menyebut momentum ini bersejarah, sekaligus peluang bagi kedua pihak untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung terlalu lama.

Mesir memainkan peran penting dalam perundingan akhir. Di Sharm el-Sheikh, perwakilan kedua pihak membahas pertukaran tahanan dan mekanisme jaminan internasional. Seorang pejabat Mesir yang dikutip *Aktual.com* menyebut,

“Kami menyediakan fasilitas penuh agar proses berjalan aman dan rahasia. Prioritas kami adalah memastikan gencatan senjata ini benar-benar dihormati.”

Usai deklarasi gencatan senjata, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengerahkan bantuan kemanusiaan besar-besaran. Juru

bicara PBB mengatakan, lebih dari 400 truk bantuan kemanusiaan per hari akan dikirim ke Gaza dalam dua bulan pertama, termasuk makanan, obat-obatan, dan tenda darurat.

PBB juga menyiapkan rencana pemulihan sektor kesehatan dan pendidikan yang hancur akibat perang. Meski suasana perayaan mulai terasa di Gaza, Hamas tetap berhati-hati.

“Kami menyambut kemenangan ini sebagai kemenangan rakyat Palestina, bukan akhir dari perjuangan,” tegas juru bicara Hamas.

Dengan berakhirnya perang dan masuknya bantuan kemanusiaan, banyak pihak menilai inilah awal babak baru bagi Palestina.

Andy Haryanto



Foto: aktual.com

Menghormati Ulama: Pilar Keberkahan Ilmu dan Penjaga Kehidupan Beragama

Di tengah derasny arus informasi dan kebebasan berekspresi di media sosial, kita sering menyaksikan fenomena yang memprihatinkan: sebagian masyarakat, bahkan yang mengaku beragama, dengan mudah merendahkan, mencaci, dan memfitnah para ulama. Padahal, ulama adalah pewaris para nabi (*waratsatul anbiya'*) yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga agama, akhlak, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sikap merendahkan ulama bukan sekadar persoalan etika sosial, melainkan bentuk kemunduran moral dan spiritual yang dapat menggerogoti keberkahan ilmu dan kehidupan beragama. Sebaliknya, menghormati ulama adalah bagian dari menghormati ilmu dan menghormati Allah serta Rasul-Nya.

Al-Qur'an menegaskan kedudukan tinggi bagi ulama karena pengetahuan dan ketakwaan mereka:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“*Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama.*” (QS. Fathir [35]: 28)

Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan ulama bukan karena gelar atau status sosial, melainkan karena kedalaman ilmunya yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang menjadikan ulama berbeda dari sekadar orang pandai atau berpengetahuan tinggi; mereka memahami hakikat kehidupan dan

mengarahkan umat menuju kebenaran. Rasulullah ﷺ bersabda:

والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

“Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang besar.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Imam al-Nawawi menegaskan dalam *Syarh Shahih Muslim*, bahwa menghormati ulama adalah bagian dari adab terhadap ilmu dan agama. Sebaliknya, merendahkan mereka berarti melemahkan sendi agama itu sendiri.

Para ulama salaf sangat menjunjung tinggi adab terhadap guru dan ulama. Imam Malik rahimahullah, misalnya, tidak akan mengajarkan hadis sebelum mandi dan mengenakan pakaian terbaiknya, sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan Rasulullah ﷺ.

Imam al-Syafi‘i berkata:

“Aku membuka lembaran kitab di hadapan guruku dengan sangat pelan, karena aku tidak ingin suara lembaran itu mengganggu beliau.”

Kini, di zaman media sosial, penghinaan terhadap ulama sering dilakukan dengan mudah, tanpa tabayun dan tanpa adab. Padahal, Islam melarang keras sikap tergesa-gesa dalam

menilai seseorang. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.” (QS. al-Hujurat [49]: 6)

Menghormati ulama bukan berarti menutup ruang kritik, tetapi menempatkan kritik dalam bingkai adab dan ilmu. Kritik boleh, tapi tidak boleh menghina. Diskusi boleh, tapi dengan akhlak. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang disertai tanggung jawab moral dan spiritual.

Ulama adalah lentera yang menuntun umat di tengah kegelapan zaman. Menghormati mereka berarti menjaga cahaya ilmu agar tetap menyala. Sementara mencaci dan memfitnah mereka hanya akan membawa umat pada kebodohan dan kehancuran moral.

Mari kita kembalikan adab dalam beragama, terutama dalam bermedia sosial. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali:

“Agama akan baik bila ulama baik, dan agama akan rusak bila ulama rusak.”

Dan yang lebih berbahaya dari ulama yang rusak adalah masyarakat yang kehilangan rasa hormat terhadap ulama.

Rizky Zulkarnain



IKUTI TERUS
DISKUSI PUBLIK BERBAGAI TOPIK TERKINI DAN MENARIK
HANYA DI:

aktual forum

Dialog Publik yang digelar setiap bulan secara hybrid (online dan offline)
di Channel YouTube aktualforum dan Cafe Warung Aceh Garuda (WAG)

Kolaborasi: 813-1019-7365

MEMBEDAH PASAL KRUSIAL

- Komjen Pol Oegroseno (Mantan Wakapolri)
- Muhammad Isnur (ketua YLBHI)
- Ifti (P)

aktualofficial Aktualcom
Aktual Forum aktualcom

KOCOK ULANG
KABINET PRABOWO

5 MENIT LAYAK
DIRESUME

Nailul Huda (Direktur Ekonomi Celioe)

Ahmad Hojin (Program Pusat)

Puspolli



Saksikan dan Ikuti Terus
Channel YouTube

aktualforum



Mengupas Berbagai Isu Terhangat dan Menjadi Perhatian Publik

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Partnership/kolaborasi: 081310197365